

**LAPORAN BULANAN PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI
PERIODE JANUARI 2015
PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI**

No	Hari/Tanggal/ Tempat	Kegiatan	Pihak yang Terlibat	Hasil dan Keputusan	Tindak Lanjut
I. KERJASAMA BILATERAL					
1.	Rabu,07 Januari 2015 Kemenlu	Persiapan Konsultasi Bilateral (Konsbil) RI-Sudan, 15 Januari 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, - Badan Litbang Pertanian, - Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, - Badan Karantina Pertanian, - Direktorat Kerjasama Teknik Kementerian Luar Negeri, - Direktorat Afrika Kementerian Luar Negeri, - Direktorat KPI Kementerian Perdagangan dan Pusat KLN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menindak lanjuti pertemuan Dirjen Aspasaf kemenlu dengan Duta Besar Sudan di Jakarta kedua belah pihak sepakat untuk membentuk forum konsultasi Bilateral RI-Sudan. 2. Semula Konsbil akan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2014, namun ditunda hingga tanggal 15 Januari di Jakarta. 3. Terkait belum adanya MoU pembentukan Konsbil serta terbatasnya jumlah delegasi (3 orang dari Kemlu Sudan dan 2 Orang dari Kedubes Sudan di Jakarta) maka agenda pembahasan akan dibatasi dibidang politik, ekonomi dan sosbud untuk beberapa isu tertentu dimana issue pertanian dibahas dalam bidang ekonomi. 4. Posisi Kementan pada prinsipnya selalu siap dan mendukung kerjasama di bidang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masukan Kementerian Pertanian telah dicatat sebagai posisi sementara Delri pada forum Konsbil tersebut. 2. Kemenlu akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak Sudan untuk menfinalisasi jadwal pertemuan dimaksud. <p>Pusat KLN akan menyiapkan posisi Delri untuk forum dimaksud.</p>

			Kementerian Pertanian	<p>pertanian terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kerawanan pangan serta peningkatan produksi pertanian.</p> <p>5. Pada saat ini kerjasama pertanian difokuskan pada tindak lanjut pengembangan demplot padi di Sudan, dan direncanakan untuk kegiatan tahun 2015 adalah melakukan pengujian teknik produksi padi untuk pengembangan di lahan petani seluas 2-5 ha serta pilot plan penggulingan padi skala kecil menengah untuk menghasilkan beras berkualitas dengan kemasan yang baik untuk tujuan konsumsi maupun ekspor.</p>	
2.	Rabu, 07 Januari 2015, di Kementerian Pertanian	Laporan Hasil rapat Pertemuan Lanjutan Proposal Bilateral Indonesia-New Zealand	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian • Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian • Pusat Kerja Sama Luar Negeri • Kedutaan Besar New Zealand di Jakarta 	<p>Hasil Pembahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat membahas tindak lanjut <i>Bridging Program Proposal</i> dan <i>English Course Proposal</i> yang telah disampaikan pada saat pertemuan WGA ke-2 pada bulan Nopember 2014 di Yogyakarta. • Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris calon peserta dari Kementerian Pertanian yang akan mengikuti program S2 dan S3 di <i>New Zealand</i>. Adapun durasi kegiatannya dilakukan sekitar 6-12 bulan, dengan biaya <i>sharing budget</i> antara Indonesia dan New Zealand. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak <i>New Zealand</i> akan melakukan presentasi mengenai program <i>New Zealand – ASEAN Scholarship</i> pada bulan Pebruari 2015 dan Badan SDM Pertanian akan mengundang seluruh instansi di lingkup Kementerian Pertanian terkait hal ini. • Terkait dengan pelatihan Bahasa Inggris, telah disepakati akan dibuat <i>joint proposal</i> dan pihak Indonesia menunggu <i>draft</i>

				<ul style="list-style-type: none"> • Saat ini, pemerintah New Zealand memiliki beberapa program yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>New Zealand – ASEAN Scholarship</i> Program ini ditawarkan kepada Indonesia setiap tahunnya sebanyak 50 peserta, dan bagi calon peserta yang sudah terpilih akan di <i>training</i> di Surabaya untuk meningkatkan kualitas Bahasa Inggris. b. Pelatihan Bahasa Inggris untuk Indonesia Bagian Timur Saat ini <i>New Zealand</i> telah mengadakan pelatihan Bahasa Inggris untuk negara-negara ASEAN, seperti Myanmar, Laos, Timor Leste dan Vietnam. Program ini dilaksanakan selama 6 bulan di <i>New Zealand</i> dan dihadiri oleh 10-20 orang peserta tiap tahunnya dan telah berjalan selama 15 tahun. <p>Pihak <i>New Zealand</i> memiliki anggaran baru pada bulan Juli 2015 sehingga masih memungkinkan apabila pihak Indonesia mengikuti program ini pada tahun 2015. Dengan adanya <i>joint funding</i> maka akan memudahkan kedua negara untuk</p>	<p>proposal tersebut dari pihak <i>New Zealand</i>.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>melakukan kerja sama ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pola program yang direncanakan Indonesia sama halnya dengan pola yang dimiliki oleh pihak <i>New Zealand</i>, namun lebih spesifik bagi pegawai Kementerian Pertanian dan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2016 dikarenakan belum tersedianya anggaran pada tahun 2015. Diharapkan program ini dapat berjalan seimbang, tidak hanya untuk Indonesia bagian timur saja. • Terkait dengan proposal <i>English Course</i>, pihak Indonesia berkeinginan untuk lebih fokus kepada <i>official business correspondence, writing country position</i> dan <i>international negotiation</i>. 		
3.	Rabu, 14 Januari 2015 di Pusat KLN, Kementerian Pertanian	Rapat persiapan pelaksanaan <i>Working Group on Agriculture, Fisheries and Forestry (WGAFF) ke-17 Indonesia Belanda</i> .	Badan Pertanian, Hortikultura, PPHP, Perkebunan, Peternakan Kesehatan Pusat Kerjasama Informasi Perkarantina, Karantina Pusat Kerjasama	Litbang Ditjen Ditjen Ditjen dan Hewan, Kependidikan dan Badan Pertanian, Analisis	1. Rangkaian Pertemuan <i>Working Group on Agriculture, Fisheries and Forestry (WGAFF) ke-17 Indonesia-Belanda</i> telah dilaksanakan pada tanggal 19-21 Nopember 2014 di Yogyakarta. Pertemuan WGAFF ke-17 diawali dengan <i>Phytosanitary Task Force Meeting</i> dan <i>Veterinary Expert Meeting ke-3</i> pada tanggal 19 Nopember 2014 serta kunjungan lapangan ke lokasi budidaya Salak dan budidaya ikan air tawar pada	Pusat KLN dapat mengirimkan surat permintaan deliri dalam waktu dekat.

			<p>Internasional dan Antar Lembaga, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pusat KLN</p>	<p>tanggal 20 Nopember 2014 di Sleman, Yogyakarta.</p> <p>2. Namun demikian, sehubungan dengan situasi luar biasa terkait merebaknya <i>Avian Influenza</i> di Belanda yang mengharuskan DG Agro selaku Ketua Delegasi Belanda untuk tetap berada di dalam negeri, Dirjen Hortikultura selaku Ketua Delri memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pertemuan WGAFF ke-17 Indonesia-Belanda.</p> <p>3. Berdasarkan kesepakatan bersama, WGAFF 17 akan dilaksanakan kembali pada tanggal 26 Januari 2014 di Gedung Pusat Informasi Agribisnis (PIA), Kementerian Pertanian. Ketua Delri diusulkan untuk tetap dipimpin oleh Dirjen. Hortikultura sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian mengenai Ketua Delegasi RI untuk perundingan kawasan Eropa, sementara Delegasi Belanda akan dipimpin oleh Direktur Jenderal Agro, Dr. Hans Hoogeveen.</p> <p>4. Delegasi RI diharapkan dapat</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>terdiri dari unsur pejabat Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pejabat lingkup Kementan yang meliputi Ditjen. Hortikultura, Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Perkebunan, Ditjen. PPHP, Badan Karantina Pertanian, Badan Litbang Pertanian dan Pusat KLN.</p> <p>Hasil <i>Phytosanitary Task Force Meeting</i> dan <i>Veterinary Expert Meeting</i>.</p> <p>5. Hal-hal yang disepakati dalam <i>Phytosanitary Task Force Meeting</i> ke-3 Indonesia-Belanda antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana dimulainya kembali ekspor bawang Belanda ke Indonesia setelah pengiriman ekspor yang pertama pada bulan September 2014. • Rencana pelaksanaan <i>technical expert meeting</i> pada awal tahun 2015 untuk membicarakan persyaratan phytosanitary terkait dengan <i>Notification of Non Compliances</i> yang dikeluarkan Indonesia untuk 	
--	--	--	--	---	--

				<p><i>Seed Potato Tubers, Raspberry dan Strawberry Young Plants</i> dari Belanda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana pelaksanaan <i>roundtable discussion</i> pada awal tahun 2015 yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas yang fokus pada pengendalian <i>Cyst Nematode (PCN)</i> dan <i>Phytophthora</i>. • Kunjungan pihak Belanda ke Indonesia untuk mendiskusikan <i>Electronic (Phytosanitary) Certification</i> pada tanggal 19-20 Pebruari 2015. <p>6. Hal-hal yang disepakati dalam <i>Veterinary Expert Meeting</i> ke-3 Indonesia-Belanda antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akses Pasar yang terdiri atas tiga (3) pokok kerja sama yaitu (i) protokol untuk pendaftaran produk kesehatan hewan; (ii) kesepakatan bilateral mengenai <i>poultry by product meal products</i>; dan (iii) ekspor produk olahan ayam Indonesia ke Belanda. • Tindak lanjut penandatanganan <i>Memorandum of Cooperation (MoC) on the Bilateral Programme on Food Security in Livestock Components</i> yang 	
--	--	--	--	--	--

				<p>telah ditandatangani pada bulan Juli 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas sebagai kelanjutan dari kegiatan <i>Training of Trainers on Risk Assessment for Livestock Products</i>. • Usulan Indonesia untuk peningkatan kapasitas bidang peternakan dan produk peternakan khususnya untuk <i>Sanitary and Phytosanitary Regulation</i>. • Usulan kegiatan baru berupa bantuan teknis pengurangan penggunaan antibiotik dan pelatihan bagi peternakan ayam skala kecil di Belanda. <p>7. Ditjen PPHP mengusulkan adanya kajian ekspor beras premium dan organik ke Belanda mengingat jumlah WNI yang berada di Belanda cukup besar. Selain itu diusulkan untuk masuk dalam agenda mengenai pembahasan <i>Joint Research on Peroxide Impact on palm Oil Products</i></p>	
4.	Rabu, tanggal 14 Januari 2015, di Kementerian Luar Negeri	Rapat Persiapan Konsultasi Bilateral Tingkat Pejabat Tinggi RI-RRT	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Kemenko Polhukam • Kementerian Perdagangan 	<p>Hasil Pembahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan rapat adalah untuk membahas persiapan pertemuan SOM ke-11 yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2015 di 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian diharapkan memiliki kerja sama lain yang dapat dimanfaatkan dengan China, seperti <i>capacity building</i>.

			<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah • LAPAN • BPPT • Kementerian Perhubungan • Kementerian Luar Negeri • Kadin Indonesia • Komite Tiongkok. 	<p>Jakarta dan dalam rangka penyusunan <i>Plan of Action</i> 2016 – 2020 yang merupakan <i>road map</i> kerja sama kedua negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 4 (empat) program besar yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, yaitu: a) Penyusunan <i>Plan of Action</i> Kemitraan Strategis Komprehensif 2016-2020; b) Perayaan 65 tahun hubungan diplomatik RI-RRT; c) Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke RRT; d) Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. • Dalam mekanisme bilateral, terdapat beberapa forum dialog bilateral antara kedua negara diantaranya: forum dialog bilateral Menko Polhukam RI-<i>State Councilor</i> RRT, forum dialog bilateral Menko Perekonomian RI-<i>State Councilor</i> RRT, forum dialog bilateral Menko Perekonomian RI-<i>State Councilor</i> RRT, <i>Joint Commission for Bilateral Cooperation</i> Tingkat Menteri Luar Negeri, <i>Consular Consultant</i>, dan mekanisme bilateral Tingkat Menteri Perdagangan, menteri Pertahanan, dll. • Prioritas kerja sama antara RI-RRT adalah kerja sama kemaritiman, pembangunan ekonomi, keamanan pangan dan energi, <i>science and technology</i>, kerja sama pertahanan, 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian berkeinginan untuk mengaktifkan kembali pertemuan <i>Joint Committee Meeting on Agricultural Cooperation</i> RI-RRT guna menggali potensi dan peluang kerja sama bidang pertanian di kedua negara. • Kementerian Pertanian akan menyampaikan bahan masukan untuk pertemuan SOM ke-11 secara tertulis kepada Kementerian Luar Negeri.
--	--	--	--	--	---

				<p>keamanan dan hukum, <i>people to people contact</i>, dan kerja sama regional dan global.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama di bidang pertanian antara kedua negara dipayungi oleh <i>MoU on Agriculture</i> yang telah berakhir masa berlakunya pada tahun 2011. Kementerian Pertanian RI telah mengambil inisiatif usulan perpanjangan MoU tersebut kepada Kementerian Pertanian China, melalui Kementerian Luar Negeri. Namun, sampai saat ini usulan tersebut belum mendapatkan respon dari Kementerian Pertanian China. • Terkait dengan akses pasar, terdapat beberapa hal yang disampaikan: <ul style="list-style-type: none"> a. Ekspor buah salak Indonesia ke China sampai sejauh ini masih berjalan lancar. b. Sejak tahun 2013 Pemerintah China secara resmi menghentikan sementara impor buah manggis dari Indonesia, karena mengandung <i>Cadmium</i>. Tim AQSIQ China telah melakukan verifikasi lapang ke kebun manggis dan fasilitas <i>packing house</i> manggis di Indonesia pada tahun 2014, namun Tim AQSIQ belum menyampaikan hasil verifikasi 	
--	--	--	--	---	--

				<p>tersebut. Diharapkan pihak China dapat segera mengeluarkan rekomendasi untuk membuka kembali pasar ekspor buah manggis dari Indonesia.</p> <p>c. Terkait dengan ekspor PKE (<i>Palm Kernel Expeller</i>) dari Indonesia ke China, Pemerintah Indonesia mengharapkan pihak China dapat memperpanjang ijin ekspor yang telah berakhir pada bulan Desember 2014.</p> <p>d. Berdasarkan informasi dari Badan Karantina Pertanian, ekspor perdana sarang burung walet dilakukan pada tanggal 14 Januari 2015. Ekspor tersebut dilakukan oleh perusahaan dari Semarang dan dikirim melalui Semarang. Dari 8 perusahaan yang disetujui oleh pihak China, ada 3 perusahaan yang dapat ekspor sarang burung walet, salah satunya adalah perusahaan dari Semarang.</p>	
5.	Rabu, 14 Januari 2015, di DJHKI, Kemenkumham, Jakarta	Pembahasan Rencana Kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa di bidang Indikasi Geografis	DJHKI, BSN, Kementerian Pertanian, Kementerian perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar	1. Tujuan rapat adalah untuk membahas rencana kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa dibidang indikasi geografis khususnya persiapan <i>Digital Video Conference</i> (DVC) antara Pemri	

			<p>Negeri, Kementerian Perindustrian, Kemenkumham</p>	<p>dengan Uni Eropa.</p> <p>2. Tujuan DVC ini adalah untuk menguatkan komitmen kerja sama dan pembahasan beberapa isu terkait kerjasama ini yang masih memerlukan klarifikasi</p> <p>3. Beberapa hal yang dibahas dalam rapat adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama dengan UE di bidang indikasi geografis dengan mengirimkan surat resmi melalui DJHKI kepada pihak UE.</p> <p>b. Kedua belah pihak telah sepakat akan mengadakan DVC yang direncanakan akan diadakan pada tanggal 30 Januari 2014 di Kementerian Luar Negeri. DVC ini masih bersifat <i>exploratory talk</i> dan belum memasuki tahap perundingan.</p> <p>c. Pengaturan teknis DVC akan dibahas secara terpisah oleh DJHKI dan Dit. KIK Amerika-Eropa, Kementerian Luar Negeri dan berkoordinasi dengan KBRI Brussel.</p> <p>d. Disepakati beberapa topik yang</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>akan dibahas dalam DVC terutama <i>Direct Protection, explanation of evocation concept, different level of enforcement, technical Assistance dan capacity building (TACB)</i> dan <i>GI product coverage</i> khususnya mengenai <i>non food GI</i>.</p> <p>e. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam mempersiapkan perjanjian ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketidakseimbangan jumlah indikasi geografis yang dilindungi di Indonesia dan UE - Perlu adanya kajian untuk mengetahui <i>cost and benefit</i> dari kerja sama tersebut yang nantinya akan dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan posisi Indonesia dalam kerja sama tersebut. - Perlu mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh kerja sama ini terutama di bidang perdagangan dan investasi, khususnya terhadap pihak 	
--	--	--	--	---	--

				<p>ketiga diluar kerja sama tersebut.</p> <p>f. Untuk tempat penyelenggaraan DVC bagi pemri akan diakomodir oleh Dit. KIK Amerika Eropa, Kementerian Luar Negeri, termasuk pengiriman kawat dan laporan terkait hasil rapat dan persiapan DVC.</p>	
6.	Rabu, 21 Januari 2015, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta	Persiapan Pertemuan <i>Mid Term Review JCM RI-AS 2015</i>	Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian pertahanan, Kementerian ESDM, Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim, Badan Keamanan Laut, Kementerian Kesehatan, Bappenas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan rapat adalah guna persiapan Delri menghadapi Pertemuan <i>Mid Term Review JCM IV RI-AS</i>, koordinasi untuk melakukan evaluasi dan mempersiapkan <i>score card</i> dan data capaian hubungan bilateral RI-AS di bawah <i>comprehensive partnership</i> paska-JCM IV, serta mempersiapkan rencana aksi kedepan sesuai prioritas-prioritas baru Pemerintah RI. 2. Pertemuan MTR-JCM direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2015 dalam bentuk <i>Joint Video Conference</i> di Kementerian Luar Negeri. Sedangkan pelaksanaan JCM RI-AS direncanakan pada bulan April 2015 di Washington. 	Pusat KLN akan berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkup Kementerian Pertanian terkait usulan bentuk ataupun konsep kerjasama di bidang <i>food security</i> dengan AS

				<p>3. Pelaksanaan MTR tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diselenggarakan pada pemerintahan baru sehingga harus mencerminkan prioritas pembangunan Indonesia sekarang. b. dirangkai sebagai tahap persiapan untuk menyusun <i>deliverables</i> sebagai bahan kunjungan kerja Presiden RI ke AS pada Juni 2015. <p>4. Untuk kerjasama RI-AS kedepan diharapkan lebih mengedepankan pada apa yang pemerintah RI mau, dan tidak hanya terkait dengan 6 <i>Working Group</i> yang sudah ada, tetapi menonjolkan kerjasama seperti bidang militer, maritime, pertumbuhan ekonomi, isu terorisme, <i>cyber security</i>, <i>blue food security</i> yang mengarah pada <i>food security</i>, kerjasama perhubungan udara dan perdagangan hewan-hewan yang dilindungi</p> <p>5. Pengelompokan baru/pokok-pokok <i>deliverables</i> kerjasama kedepan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerjasama militer 	
--	--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> b. Kerjasama maritime c. Pertumbuhan ekonomi d. <i>Environment protection</i> e. <i>Propeople initiative</i> yang didalamnya termasuk Kerjasama di bidang <i>food security</i>. 	
7.	Rabu, 21 Januari 2015 di Sekertariat Badan Litbang Pertanian	Rapat membahas persiapan bahan DELRI pada <i>International Workshop on Conservation and Susustainable Use of Genetic Resources</i>	Rapat dipimpin oleh Dr. Muhamad Sabran dan dihadiri oleh peneliti sumberdaya genetik lingkup badan litbang serta wakil dari Pusat KLN	<p>Hal-hal yang dibahas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat membahas persiapan bahan DELRI pada <i>International Workshop on Conservation and Susustainable Use of Genetic Resources</i>. 2. Kerjasama sumberdaya genetik Balitbangtan dengan Jepang diberi judul <i>Indonesia - Japan joint framework project for mutual utilization of plant genetic resources for food and agriculture</i>. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk membangun kerangka kerjasama yang saling menguntungkan dari sumberdaya genetik kedua negara dengan mengikuti tujuan proyek. 3. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan varietas baru yang dapat dipasarkan di pasar kedua negara maupun pasar global. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Muhamad Sabran menyarankan agar komoditi yang dipertukarkan tidak terlalu banyak mengingat Jepang juga hanya memiliki sumberdaya genetik yang terbatas. 2. Kerjasama Balitbangtan dengan Jepang merupakan tindak lanjut dari <i>Record of Discussion</i> yang telah ditandatangani kedua negara pada tanggal 14 April 2014 di Tokyo. 3. Bentuk kerjasama akan dibahas lebih lanjut pada saat pelaksanaan workshop di Tokyo.

				<p>4. Institusi yang akan terlibat dalam kegiatan ini dari pihak Indonesia adalah Kementerian Pertanian dan Institut Pertanian Bogor. Sedangkan dari pihak Jepang diwakili oleh <i>Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)</i>, <i>National Institute of Agrobiological Sciences (NIAS)</i>, Perusahaan benih dan Universitas Jepang yakni Kyushu University.</p> <p>5. Pada workshop tersebut Indonesia akan diwakili oleh Dr. Muhamad Sabran dan Dr. Sri Rianawati.</p> <p>6. Selain membahas posisi DELRI rapat tersebut juga membahas perkembangan kerjasama Balitbangtan dengan Jepang. Salah satu kerjasama yang dibahas antara lain kerjasama Balitbangtan dengan Universitas Kyushu.</p> <p>7. Saat ini draft perjanjian kerjasama ada pada pihak Indonesia dan akan dibahas lebih lanjut pada saat pelaksanaan workshop di Tokyo.</p> <p>8. Saat ini draft perjanjian kerjasama ada pada pihak Indonesia dan akan dibahas lebih lanjut pada saat</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>pelaksanaan workshop di Tokyo.</p> <p>9. Kerjasama bidang sumberdaya genetik antara Balitbangtan dengan pihak Jepang tidak hanya dengan universitas namun juga dengan Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang serta pihak swasta. Saat ini belum ditentukan bentuk kerjasama yang akan dijalin. Pusat KLN menyarankan agar kerjasama dibuat dalam bentuk <i>Technical Arrangement</i>.</p>	
8.	<p>Jum'at, 23 Januari 2015</p> <p>Kampus Kementan Ruang Rapat SAM Gd.A Lt.3</p>	<p>Kunjungan Delegasi Asosiasi Petani <i>Khartoum State</i> Sudan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PPHP - Pusat KLN Kementerian Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan dimulai pkl. 14.00 di ruang rapat SAM Gd.A Lt.3 Kampus Kementan. 2. Delegasi Sudan sebanyak 13 Orang yatiu: <ul style="list-style-type: none"> - Yassir Yousif Habiballa (Member of Parlieament/Komisi HAM) - Abdalla Adam Abbas Ali (Member of Parliament/Komisi Pertanian) - Yagoub Hamid Hamid Abdalla (Sekjen Asosiasi Petani Sudan) - Alsiddig Ali Ahmed Ramli (Pengusaha Tani) - Fadlalla Hassan Mohamed Abdalkhalig (Pengusaha Tani) - Abopbaida Abuzaid 	<p>Indonesia sangat senang dan akan mencoba untuk mengembangkan kerjasama dengan melakukan penjajakan potensi investasi produk unggulan Indonesia seperti sawit dsb.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Gamereldin (Pengusaha Tani) - Abdel Moneim Mansour Ahmed (Pengusaha Tani) - Hassan Mohamed Abba Sabair (Pengusaha Tani) - Surur Mohamed Surur (Pengusaha Tani) - Hassan Merghani Ali Eltom (Pegawai pemerintahan) - Mustafa El Khalifa Yousif Badr (Pengusaha Tani) - Sayed Mohamed Sheriff Ahmed (Insinyur Pertanian) - Muhammadain Al awad Ali (Businessmen) <p>3. Kunjungan tersebut bermaksud untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan pertanian di Indonesia yang dianggap lebih maju dari Sudan.</p> <p>4. Sudan berterimakasih atas kerjasama yang selama ini telah terbangun dengan baik. Kunjungan kali ini adalah salah satu keseriusan Sudan untuk selalu memupuk jalinan kerjasama antar kedua Negara.</p> <p>5. Pada kesempatan kunjungan tersebut Sudan berterimakasih atas kerjasama proyek demplot padi yang telah berhasil dilaksanakan di Sudan dan berharap dapat memperluas area proyek komoditas yang lain yang mungkin dapat</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>dilakukan di Sudan.</p> <p>6. Pemerintah Sudan mengundang Indonesia untuk berkunjung ke Sudan dan melihat potensi pertanian yang memungkinkan untuk dikembangkan. Karena Sudan memiliki potensi lahan yang sangat luas dan subur.</p>	
9.	Jumat, tanggal 23 Januari 2015, di Kementerian Luar Negeri	Rapat Persiapan <i>Scorecard Meeting</i> RI-New Zealand	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Kemenko Polhukam • Kementerian Perdagangan • Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Koordinator Kemaritiman • Kementerian Pertahanan • Kementerian Pariwisata • Kementerian Keuangan • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Dalam Negeri • Bappenas 	<p>Hasil Pembahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan rapat adalah untuk membahas persiapan pertemuan <i>Scorecard Meeting</i> dan <i>Joint Ministerial Commission (JMC)</i> ke-7 RI – <i>New Zealand</i>. Pertemuan JMC ke-7 direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 2-5 Maret 2015 di <i>Auckland, New Zealand</i>. Pada pertemuan JMC sebelumnya telah disepakati untuk melakukan <i>Scorecard Meeting</i> RI – <i>New Zealand</i> sebagai persiapan pertemuan JMC dan untuk memudahkan area kerjasama yang <i>pending</i> dan memiliki hambatan di kedua negara. • Pada pertemuan bilateral antara Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana Menteri <i>New Zealand</i>, John Key, di sela-sela pertemuan EAS Summit tanggal 13 November 2014 di Myanmar, salah satu isu yang dibahas adalah kerjasama di bidang pertanian. Kedua belah pihak 	Pertemuan WGA ke-4 direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2015 di <i>New Zealand</i>

			<ul style="list-style-type: none"> • BNP2TKI • Kementerian Perhubungan • Kementerian Negeri 	Luar	<p>sepakat untuk menjajaki investasi di bidang pertanian dan peternakan, khususnya daging dan produk susu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait dengan kerjasama pertanian, telah dilaksanakan pertemuan <i>Working Group on Agriculture Cooperation (WGAC)</i> ke-3 pada tanggal 24-25 Nopember 2014 di Yogyakarta. Perkembangan perdagangan produk pertanian diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> a. Buah manggis Indonesia: Pihak Indonesia telah mengusulkan perlakuan dengan <i>ethyl formate</i> terhadap buah manggis sehubungan dengan telah ditemukannya telur bekicot dan semut pada buah manggis tersebut. b. Buah salak Indonesia: Pihak <i>New Zealand</i> akan mengirimkan <i>tim assessment</i> ke Indonesia pada awal tahun 2015 terkait dengan analisa resiko importasi salak dari Indonesia. c. Daging ayam olahan Indonesia: Pihak Indonesia berkeinginan untuk membuka pasar daging ayam olahan di <i>New Zealand</i> dan meminta prosedur dan persyaratan importasi <i>New Zealand</i>. Indonesia pun mengundang tim <i>New Zealand</i> 	
--	--	--	--	------	--	--

				<p>mengunjungi <i>processing plants</i> daging ayam olahan untuk <i>technical assessment</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait dengan <i>capacity building</i> di bidang peternakan, saat ini <i>Arrangement Partnership</i> Indonesia – <i>New Zealand Dairy Excellence Activity</i> (IDEA) belum ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pihak Indonesia masih menunggu tanggapan dari pihak <i>New Zealand</i> mengenai <i>draft Arrangement Partnership</i> tersebut. • Terkait dengan <i>capacity building</i> di bidang perkarantinaan, dokumen <i>Partnership Arrangement</i> kegiatannya telah ditandatangani pada bulan Nopember 2013 dengan judul <i>The Agricultural Quarantine Services Improvement Activity</i> (AQSI), dan saat ini telah berjalan dengan baik. • Selain itu, ada keinginan dari <i>New Zealand</i> mengenai ekspor sapi bibit. Indonesia menyambut baik importasi sapi bibit dan betina produktif dari <i>New Zealand</i>, sepanjang persyaratan kesehatan hewan telah diharmonisasi dan disetujui. Disepakati bahwa aspek teknis persyaratan kesehatan hewan akan dibahas antar instansi berwenang di kedua negara. • Terkait dengan <i>Short-term capacity</i> 	
--	--	--	--	--	--

				<p><i>building for International negotiations on agricultural trade issues of mutual interest</i>, direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 16-18 Pebruari di Bogor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait dengan <i>education and training for Indonesian officers in the field of agriculture</i>, pihak Indonesia mengusulkan dua proposal kepada Pemerintah <i>New Zealand</i>, yaitu: <i>Bridging Program</i> dan <i>English Course</i> bagi Pejabat Kementerian Pertanian di <i>New Zealand</i>. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan WGA tersebut, telah dilakukan pertemuan antara Kementerian Pertanian dan perwakilan dari <i>New Zealand</i> serta menyepakati untuk membuat <i>joint proposal</i>. Pihak Indonesia menunggu <i>draft</i> proposal tersebut dari pihak <i>New Zealand</i>. • Terkait dengan <i>technical assistance on technology for potato soil sterilization (soil heater), nematode and virus controlling on potatoes</i>, kegiatan ini belum ada perkembangan lebih lanjut, maka pihak Indonesia mengusulkan memodifikasi kegiatan ini dengan judul "<i>Cooperation on Integrated Pest Management (IPM) for Potatoes</i>". Kegiatan ini meliputi transfer teknologi pengendalian hama, <i>training</i> dan penguatan 	
--	--	--	--	--	--

				kapasitas laboratorium.	
10.	Rabu, 28 Januari 2015. RR. Direktorat ASTIMPAS, Kemlu.	Rapat Persiapan Kunjungan Presiden RI ke Malaysia, Brunei, dan Filipina.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Astimpas, Kemenlu 2. Pusat KLN 3. Kementan 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. Basarnas 6. Kementerian KKP 7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 8. Interpol 9. BNN. 	<p>Hal-hal yang dibahas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat membahas posisi Indonesia terhadap negara Malaysia, Brunei dan Filipina dalam rangka kunjungan Presiden RI ke ketiga negara tersebut pada tanggal 5 - 10 Februari 2015. 2. Isu yang menjadi kepentingan Indonesia dengan Malaysia antara lain Isu Perbatasan dan Polhukam, Perlindungan WNI, Ekonomi, Perdagangan dan Investasi, Pendidikan dan <i>People to People Contacts</i> dan Kerjasama Maritim. Sedangkan isu lain yang dibahas yakni isu perkembangan penyelesaian Delimitasi Batas Maritim di Laut Sulawesi. 3. Isu yang menjadi kepentingan Indonesia dengan Brunei antara lain Kerjasama Polhankam, Kerjasama Ekonomi, Perlindungan WNI, Kerjasama Sosial Budaya dan <i>People to People Contacts</i>, dan Kerjasama Kesehatan. Hubungan Bilateral dengan Brunei selama ini tidak ada permasalahan maupun menemui kendala yang berarti namun intensitasnya sangat rendah dan perlu lebih ditingkatkan terutama di bidang pertanian. 4. Isu yang menjadi kepentingan 	Pihak Direktorat Asstimpas berjanji akan menindaklanjuti informasi dari Pusat KLN Kementan terkait final draft MoU kepada pihak Filipina agar final draft tersebut dapat segera ditandatangani.

				<p>Indonesia dengan Filipina antara lain Isu Perbatasan, Kerjasama Polhukam, Perlindungan WNI, Kerjasama Ekonomi, dan <i>People to People Contacs</i>. Sedangkan isu yang yang mungkin akan dibahas Presiden yakni isu Moratorium lisensi penangkapan ikan yang dikeluhkan sejumlah pengusaha dan investor Filipina.</p> <p>5. Wakil dari Pusat KLN Kementan menjelaskan bahwa hubungan Bilateral dengan Malaysia dibidang pertanian baru saja diperbaharui dengan MoU yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Juni 2014 di Bandung. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada tahun ini tepatnya Bulan April akan dilakukan penandatanganan MoU lain yakni <i>MoU on Commodity Cooperation</i> yang rencananya juga akan dilaksanakan di Indonesia yakni di Bali.</p> <p>6. Lebih lanjut dijelaskan Hubungan Bilateral dengan Brunei selama ini tidak menemui kendala namun juga perlu lebih ditingkatkan mengingat Brunei merupakan Negara yang sangat berpotensi dalam segi investasi yang dapat kita manfaatkan untuk memajukan pertanian.</p> <p>7. Hubungan Bilateral dengan Filipina</p>	
--	--	--	--	--	--

				di bidang pertanian akan diperbaharui dengan MoU. Final draft MoU telah disampaikan pihak Indonesia kepada Filipina melalui Direktorat Astimpas, Kemenlu pada tahun 2014 yang lalu namun sampai saat ini belum ada tanggapan maupun perkembangan lebih lanjut. wakil dari Pusat KLN Kementan meminta penjelasan dan bantuan dari Kemenlu untuk menindaklanjuti final draft MoU dimaksud.	
II. KERJASAMA MULTILATERAL					
1.	Senin,9 Januari 2015, Pusat KLN	Memproses surat tenaga ahli FAO untuk proyek 103	<ul style="list-style-type: none"> • FAO • Ditjen Nakeswan 	<p>1. Telah diproses 2 orang tenaga ahli FAO a.n. Mr. James McGrane sebagai <i>team leader of ECTAD Programme in Indonesia</i> dan Mr. Lucas Schoonman sebagai <i>Chief Technical Advisor (Analysis and Development)</i>.</p> <p>2. Kedua tenaga ahli tersebut akan melaksanakan tugas dibawah proyek OSRO/INS/103/USA periode 10 Desember 2014 s.d. 30 September 2015.</p>	Surat tersebut telah diteruskan ke Kantor Perwakilan FAO di Indonesia.
2	Senin, 9 Januari 2015, Pusat KLN	Memproses surat permintaan dari perwakilan FAO	<ul style="list-style-type: none"> • FAO 	Telah diproses surat dalam rangka kunjungan Mr. Peter Black <i>Deputy Regional Manager of the ECTAD FAO</i>	Surat tersebut telah diteruskan ke Ditjen Nakeswan.

		terkait kunjungan FAO RAP.		<i>RAP</i> yang akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 18 s.d. 24 Januari 2015.	
3	Senin-Selasa/ 12-13 Januari 2015/Cisarua, Bogor	Rapat Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Bidang Multilateral TA 2015	Bidang Multilateral, Sub bidang PBB, sub bidang OIP-NP, sub- usat Kerja Sama Luar Negeri, Kemtan	Beberapa rencana pokok Bidang OIPNP TA 2015, sbb: a) Kerjasama dengan Organisasi Internasional Pemerintah dan Non Pemerintah Anggaran: Rp 112.490.000,- b) Pemetaan Posisi Sektor Pertanian pada Forum Internasional Anggaran: Rp 166.762.000,- c) Kerjasama Ekonomi, Sosial, Lingkungan dan Investasi Anggaran: Rp 69.785.000,- d) Diseminasi <i>Lesson Learned</i> Hasil Kajian Proyek IFAD Anggran: Rp 258.528.000,- e) Profil Kerjasama Indonesia-IFAD Anggaran: Rp 500.000.000,- f) Policy Study Penanggulangan Kemiskinan di Sektor Pertanian (READ-IFAD) Anggaran: Rp 700.000.000,-	
4.	Senin-Selasa, 12 -13 Januari	Konsinyasi Penyusunan Bahan	Bidang Multilateral	Bahan presentasi rencana kegiatan	Presentasi rencana kegiatan bidang Multilateral pada

	2015, Cipayung	Presentasi Rencana Kegiatan Bidang Multilateral tahun 2015		bidang Multilateral	konsinyasi rencana kegiatan Pusat KLN pada tanggal 15 – 16 Januari 2015
5.	Selasa / 13 Januari 2015 / R.R Kementerian Perdagangan	<i>Questionnaires the 5th Global Review Aid for Trade, Committee on Trade and Development World Trade Organization (WTO)</i>	Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Global Review Aid for Trade</i> merupakan forum <i>review</i> terhadap konsep dan implementasi <i>aid for trade</i>. <i>Aid for trade</i> merupakan skema bantuan dari negara maju ke negara <i>developing country</i> dan LDC's dengan tujuan untuk mengembangkan perdagangan dunia , khususnya untuk meningkatkan kemampuan negara berkembang dan LDC's dalam perdagangan internasional. • Sebelum <i>Event Global Review</i>, negara anggota harus mengisi <i>questionnaire</i> sebagai <i>self assessment</i> terkait <i>air for trade</i> masing-masing negara. 	Kegiatan WTO diharapkan dapat meningkatkan kewirausahaan sektor pertanian di luar negeri dan perdagangan internasional.
6.	Rabu, 14 Januari 2015, Jakarta	Persiapan rapat tindak lanjut <i>Letter of Intent</i> (Lol) kerja sama RI – FAO	Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Undangan rapat - Surat peminjaman ruang rapat 332 Lt.3 - Bahan tayangan rapat - <i>Letter of Intent</i> (Lol) 	Pelaksanaan Rapat tindak lanjut <i>Letter of Intent</i> (Lol) kerja sama RI – FAO pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 di Ruang Rapat 332
7.	Selasa/14 Januari 2015/R.R Pusat Kerjasama Luar Negeri,	Rapat Pagu PHLN 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Unit Eselon 1 Kementerian Pertanian • Biro Perencanaan 	1. Realisasi READ kumulatif s.d 2014 sebesar 96,37%. Rencana kegiatan LSM 2015 masih diproses di Kemenkeu ke IFAD. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari IFAD. Proses pergeseran anggaran dari	Pusat Kerjasama Luar Negeri akan memberikan pagu PHLN kepada Bitro Perencanaan untuk diproses di Bappenas dan Kemenkeu.

	Kementerian Pertanian			<p>SDM ke KLN, tetap menggunakan nota dinas dari SDM ke Sekjen. Dan pergeseran dari SDM ke Sekjen memerlukan persetujuan dari DPR.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. UU APBN akan dilaksanakan pada akhir Februari 2015. Sedangkan untuk DIPA akan dilaksanakan pada awal Maret 2015. 3. Realisasi SOLID untuk pinjaman sebesar 80,3%. Sedangkan untuk hibah sebesar 93%. Progres MTR saat ini surat masih berada di Bappenas untuk diteruskan ke Kemenkeu. 4. Perwakilan kantor SOLID di Indonesia, perwakilan kedatangan oleh gubernur dan presiden IFAD. 5. SMARTD akan diperpanjang hingga tahun 2019. Penggunaan dana dari komponen A dan B tidak dapat diperuntukkan untuk perjalanan dinas. Sedangkan pada komponen C, proyek berjalan hingga tahun 2016. Untuk tenaga ahli, ada pemangkasan dari 30 orang menjadi 15 orang. Sedang dilakukan peninjauan agar tenaga ahli dimaksud dapat berasal dari Indonesia. Proyek SMARTD diharapkan dapat menambah target beasiswa sekolah. 6. Proyek KfW diharapkan ada harmonisasi peraturan dengan Pemri. Pembangunan fisik sudah berjalan 100%, hanya menunggu pemasangan 	
--	-----------------------	--	--	---	--

				<p>alat isolator dan tenaga ahli yang akan mentraining isolator tersebut.</p> <p>7. Untuk proyek Fortifikasi hingga tahun 2014 sudah mencapai 87% atau sekitar Rp. 2,6 M. Ada satu kajian yang tidak dapat dilaksanakan karena terkendala waktu dan akan dilanjutkan pada tahun 2015, yang mana total nilai sebesar Rp. 1,9 M. Anggaran tersebut akan dimasukkan ke DIPA TA 2015.</p> <p>8. Proyek AWM, akan diperpanjang hingga tahun 2015. Akan berjalan pada bulan Maret 2015. Hanya perlu persetujuan dari Badan Litbang Pertanian, karena MoUnya sudah ada di Badan Litbang.</p> <p>9. Proyek UNDP sudah ditandatangani dan telah disetujui. Pengelola keuangan ada di UNDP dan perkebunan hanya sebagai pendukung kegiatan. Kegiatan tersebut berada di bawah Dit. Tanaman Tahunan, Perkebunan.</p>	
8.	Selasa/14 Januari 2015/R.R 332, Kementerian Pertanian	Rapat Pemetaan Potensi Komoditas Pangan untuk Kerjasama Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Unit Eselon 1 Kementerian Pertanian 	<p>1. Rapat ini bertujuan untuk membahas persiapan kegiatan pemetaan potensi komoditas pangan untuk kerjasama internasional.</p> <p>2. Dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan pertanian yang berkelanjutan di</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pusat KLN menunggu tanggapan terkait pedoman teknis PHLN dari masing-masing unit Eselon 1.

				<p>Indonesia, peran aktif Pemerintah khususnya Kementerian Pertanian dalam memanfaatkan berbagai peluang Kerjasama luar negeri sangat diperlukan, sehingga hubungan kerja sama dengan berbagai lembaga dan negara donor perlu dioptimalkan sebagai alternatif sumber pendanaan. Dalam mendukung program dimaksud perlu dilakukan pemetaan potensi komoditas pangan sebagai bahan dalam kerja sama internasional. Komoditas pangan yang dijadikan prioritas dalam pemetaan ini adalah padi, jagung, kedelai, gula dan daging sesuai dengan prioritas pembangunan pertanian Kabinet Kerja. Untuk itu diperlukan masukan dari unit Eselon 1 terkait, untuk mensukseskan pemetaan dimaksud.</p> <p>Kegiatan Pemetaan Potensi Komoditas Pangan untuk Kerjasama Internasional ini bertujuan untuk menggali potensi komoditas padi, jagung, kedelai, gula dan daging sebagai bahan dalam kerjasama internasional untuk mencapai swasembada pangan kelima</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>komoditas tersebut.</p> <p>3. Output yang akan dihasilkan dari kegiatan tersebut berupa buku Pemetaan Potensi Komoditas Pangan untuk Kerjasama Internasional.</p> <p>4. Masing-masing unit eselon 1 membuat ringkasan potensi komoditas atau kerjasama yang menjadi prioritas termasuk lokasinya untuk diusulkan dalam kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri serta kerjasama kepada lembaga donor atau negara mitra.</p> <p>5. Ringkasan diharapkan dapat disampaikan kepada Pusat Kerjasama Luar Negeri melalui fax 021-784350 atau email:multilateral_pkn@yahoo.co.id paling lambat pada tanggal 20 Januari 2015 disertai surat resmi dari masing-masing eselon 1.</p>	
9.	Kamis, 15 Januari 2015, Jakarta	Persiapan rapat HPS ke-35 tahun 2015	Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan,	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Undangan rapat - Bahan tayangan rapat 	Peaksanaan rapat persiapan HPS ke-35 tahun 2015 pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015

			Kementerian Luar Negeri, Sekdan dan BKP provinsi Sumatera Selatan		
10.	Jum'at, 16 Januari 2015, Jakarta	Memproses surat terkait sidang CODEX dan kontribusi FAO Headquarter	Kementerian Pertanian dan Kementerian Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Surat perihal pemberitahuan pertemuan CODEX di Malaysia dan Hungaria pada bulan Februari - Surat perihal kontribusi Pemerintah Indonesia kepada FAO tahun 2015 	<ul style="list-style-type: none"> - Meneruskan surat pertemuan CODEX ke Sesditjen PPHP, Kemtan - Meneruskan surat kontribusi FAO ke Sesditjen Multilateral, Kemlu
11.	Selasa / 20 Januari 2015/ R.R Kemenko Perekonomian	Rapat Koordinasi Penyusunan <i>Blue Print</i> : Implementasi Komitmen Indonesia pada Forum G-20.	Kemenko Perekonomian, Kemlu, Kemkeu, Bappenas, Kemenaker, Kementan, Kem ESDM, Kem LH dan Kehutanan, Kemenperin, Kem Koperasi dan UKM, KPK, BKPM, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia pada forum G-20 adalah untuk kepentingan nasional Indonesia. • Terdapat 6 sektor yang telah disepakati oleh negara anggota G-20, termasuk Indonesia antara lain : <ul style="list-style-type: none"> -Infrastruktur -Energi -Pembangunan -Tenaga Kerja -Perdagangan -Anti Korupsi • Sektor pertanian masuk dalam kategori sektor pembangunan. • Pada tanggal 2-3 Februari 2015 terdapat agenda Meeting on 	Setiap Kementerian/ Lembaga diminta menyampaikan rujukan G-20, implementasi, peluang, masalah/ kendala dan rencana kerja terkait ketahanan pangan, khususnya menyangkut investasi, produktivitas, penghasilan petani serta kualitas industri pangan (sedang dalam proses).

				Development Working Group (DWG) yang akan dilaksanakan <i>back to back</i> dengan <i>Agricultural Expert</i> di Turki	
12.	Selasa / 20 Januari 2015 / R.R Pemasaran Ditjen PPHP Kemtan	Pembahasan jadwal pelaksanaan program kerja Tim Satgas G-33 dan mempersiapkan Posisi Bidang Pertanian Indonesia dalam rangka <i>Mini Ministerial</i> WTO di Davos Swiss tanggal 24 Januari 2015	Kemdag, Kemetan, Kemlu, IPB dan Perum BULOG.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mini Ministerial Meeting</i> WTO akan dilaksanakan tanggal 24 Januari 2015 di Davos, Swiss. • Tim satgas G-33 membahas program kerja hasil rapat koordinasi tanggal 25 September 2014 di Yogyakarta 	Merumuskan <i>Post Bali Work Programme</i> yang memiliki batas akhir Juli 2015, solusi permanen untuk PSh-FS dan adopsi <i>Protocol of Amendment</i> perjanjian <i>trade facilitation</i> .
13.	Rabu, 21 Januari 2015, Kanpus Kementerian Pertanian	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penandatanganan Lol kerjasama RI - FAO	Eselon 1satu lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Kemlu, KKP, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, serta unsur-unsur eselon satu lingkup Kemtan. 2. Kepala Biro Hukum dan informasi publik menjelaskan bahwa selama ini banyak perjanjian yang dibuat dengan lembaga luar negeri tidak jelas tindak lanjutnya. 3. Wakil Kemlu minta pembahasan HCA diundur karena saat ini semua bentuk <i>Host Country Agreement</i> (HCA) antara Pemri dan lembaga-lembaga internasional akan evaluasi. 4. Disepakati perlu dibentuknya tim kecil untuk kerja sama RI – FAO sesuai 	Eselon satu teknis lingkup Kemtan akan menyiapkan bahan untuk <i>Country Programming Framework</i> (CPF) dan Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS).

				<p>prioritas program yang diusulkan masing-masing Kementerian (Kemtan, KKP dan Kemhut).</p> <p>5. Eselon satu Teknis lingkup Kemtan akan menyiapkan bahan untuk Country Programming Framework (CPF) dan Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS).</p>	
14.	Jum'at / 23 Januari 2015/ R.R Pemasaran Ditjen PPHP Kemtan	Rapat Optimalisasi Keanggotaan Indonesia dalam <i>International Sugar Organization</i> (ISO)	Pusat KLN Kemtan, Puslitbang Badan Litbang Pertanian, Setditjen PPHP, Dir PI Ditjen PPHP, Setditjen Perkebunan, Dir Tanaman Semusim Ditjen Perkebunan, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI)	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia kembali menjadi anggota ISO adalah atas dorongan Asosiasi Gula Indonesia (AGI). • Selama ini bantuan dari ISO berupa pelaksanaan workshop dan dianggap belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Akan ada rapat lanjutan yang mengundang <i>stakeholder</i> lainnya (Kemenko Perekonomian, Kemlu, Kemdag dan Kemenperin) karena rapat tanggal 23 Januari 2015 masih lingkup Kemtan. • Kemungkinan rapat akan diadakan di P3GI Pasuruan Jawa Timur. • Agar disiapkan kebijakan Mentan terkait gula dan implementasi di lapangan. • Direncanakan akan dilaksanakan FGD untuk mendukung swasembada gula.
15.	Rabu, 28 Januari 2015, Kanpus Kemeterian Pertanian	Rapat persiapan Hari Pangan Sedunia ke-35 tahun 2015	Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan	1. Kapus KLN menyampaikan paparan mengenai HPS antara lain: latar belakang, tujuan dan manfaat, sasaran, waktu dan tempat, tema, rangkaian kegiatan peringatan HPS,	1. Koordinasi antara panitia pusat dan daerah dalam rangka penyusunan SK panitia Pusat dan SK Panitia Daerah serta

			<p>Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>	<p>acara puncak kegiatan, kegiatan yang diperlukan pusat dan daerah, undangan, logo dan sekilas peringatan HPS dari tahun 2011 hingga 2014.</p> <p>2. Sekda Sumsel menyampaikan lokasi acara puncak HPS dilaksanakan di Jakabaring Sport City. Pameran akan diadakan di gedung Sriwijaya (jaraknya lebih kurang 1 km dari Jakabaring). Musi Banyu Asin adalah rawa pasang surut yang luasnya ribuan hektar dan sentra beras di Sumsel pada saat ini. Sumbawa jauh (30 km) tapi lengkap dengan pertanian (pembibitan, perikanan, perkebunan, dll).</p> <p>3. Perwakilan dari Ditjen Perkebunan menyampaikan bahwa ditjenbun belum melaksanakan rapat maupun kegiatan persiapan HPS. Setelah ini akan dibentuk tim kecil untuk persiapan. Diharapkan undangan resmi untuk survei lapangan di Sumsel. Ditjenbun sudah menganggarkan Rp. 1,4 milyar untuk kegiatan HPS. Sharing pameran Rp. 500 juta, sedangkan dana yang lain dianggarkan untuk kegiatan lainnya.</p>	<p>pendanaan yang disediakan oleh Pusat dan Daerah.</p> <p>2. Rapat koordinasi dan cek lokasi acara puncak HPS di Sumatera Selatan</p>
--	--	--	--	--	--

III. KERJASAMA REGIONAL				
1.	Rabu, 7 Januari 2015	Rapat Persiapan <i>The 11th Session of CAPSA's Governing Council</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Setbalitbang • PSE-KP • Puslitbangtan • Pusat KLN 	<p>1. Tujuan dari pertemuan ini adalah membahas usulan kenaikan <i>pledge</i> kontribusi Pemerintah RI pada CAPSA dan rencana penyelenggaraan Sidang GC CAPSA ke-11.</p> <p>HASIL PERTEMUAN</p> <p>2. CAPSA sedang mengalami kondisi keuangan yang memprihatinkan. Hal ini disebabkan kurangnya dukungan institusional dari negara-negara anggota berupa kontribusi tahunan yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan belanja rutin CAPSA yang sebagian besar berupa belanja gaji staf. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak CAPSA bahwa gaji untuk Direktur CAPSA dan para <i>expert</i> berasal dari pendanaan PBB dan sumber dana asing lainnya seperti Jepang dan EU dalam bentuk penyertaan para <i>expert</i> tersebut dalam proyek-proyek tersebut, sedangkan staf pendukung lainnya dibiayai dari dana cadangan CAPSA.</p> <p>3. CAPSA mengajukan usulan</p>

- Terkait permintaan Indonesia poin 12a, Direktur CAPSA menyampaikan bahwa untuk pelibatan tenaga ahli Indonesia sebagai staf internasional di CAPSA adalah murni sepenuhnya melalui seleksi kompetitif yang dilaksanakan oleh UN. Kemudian, untuk poin 12b, Hal ini dimungkinkan, dan CAPSA meminta agar pemerintah RI dalam hal ini membuka "*call for proposal*". Untuk poin 12c, CAPSA akan berkoordinasi dengan HRD UNESCAP untuk mendapatkan pertimbangan, dan akan mengkonfirmasi Kementan dalam waktu dua minggu.

- Direktur CAPSA menginformasikan bahwa USD 160,000 belum cukup untuk menutupi

				<p>kenaikan <i>pledge</i> kontribusi Indonesia sebesar USD 190,000 (pada tahun 2013). Kepala Badan Litbang Pertanian melalui suratnya nomor 446/KL.420/I.1/3/2014 tanggal 7 April 2014 mengusulkan besaran kontribusi Indonesia kepada CAPSA sebesar USD 160,000.</p> <p>4. Kontribusi rutin Indonesia adalah IDR 767,000,000 (DIPA Kemlu) dan <i>in-kind</i> 93,000 USD (DIPA Kementan cq.Balitbang). Berdasarkan perbedaan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US Dollar, CAPSA merekap pembayaran kontribusi Indonesia untuk tahun 2012 sebesar 79,622 USD, tahun 2013 sebesar USD 82,068 USD, dan 2014 sebesar 62,982 USD.</p> <p>5. Terhadap hal tersebut, Kepala PSEKP menyampaikan bahwa Indonesia mengapresiasi keberadaan kantor CAPSA. Beliau menyampaikan bahwa manfaat CAPSA secara khusus di bidang pertanian belum signifikan, namun manfaat secara umum diantaranya peningkatan <i>capacity building</i>, dan jejaring kerjasama dengan lembaga penelitian di negara-negara Asia Pasifik.</p>	<p>biaya operasional CAPSA. Untuk itu, CAPSA meminta bantuan Indonesia untuk kembali mengingatkan negara-negara anggota GC CAPSA lainnya untuk segera membayar dan meningkatkan jumlah <i>pledge</i> kontribusinya kepada CAPSA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal Kerjasama Selatan-Selatan, CAPSA memiliki pengalaman secara teknis. Berdasarkan hal ini, CAPSA berkeinginan untuk terus bekerjasama secara intensif dengan Kementan dalam hal meningkatkan KSS khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan melalui pembangunan pertanian berkelanjutan. Hal ini merupakan poin yang dapat meningkatkan <i>leverage</i> Indonesia di mata dunia dalam hal KSS. • Terkait dengan GC CAPSA ke-11, Direktur
--	--	--	--	--	--

			<p>6. Sekretariat Badan Litbang menyampaikan bahwa Indonesia berkepentingan untuk tetap menjadi tuan rumah CAPSA, dan jika dimungkinkan adanya peluang Indonesia untuk menempati posisi Direktur CAPSA. Disampaikan jika CAPSA menuntut untuk meningkatkan <i>in-kind</i> dari Kementerian Pertanian, maka Kementerian Pertanian dapat memanfaatkan program CAPSA untuk mendukung pembangunan pertanian Indonesia.</p> <p>7. Diinformasikan berdasarkan hasil rapat pembahasan di Kemlu 27 Juni 2014, jika manfaat dari kerjasama CAPSA terhadap pembangunan pertanian di Indonesia dirasakan belum signifikan, maka Pemri dimungkinkan untuk melepas keberadaan kantor CAPSA.</p> <p>8. Terkait permintaan CAPSA untuk membiayai <i>local</i> staf dengan US Dollar, pertemuan menyepakati untuk tidak memenuhi hal tersebut, karena tidak sesuai dengan Standar Biaya Keluaran (SBU) pemerintah RI. Rapat mengharapkan agar SDM pertanian dapat diikutsertakan secara aktif dalam kegiatan CAPSA, baik tenaga ahli sebagai staf</p>	<p>CAPSA menginformasikan bahwa perkiraan jumlah anggota Sidang GC CAPSA berjumlah 35 orang. Dari jumlah itu, akan hadir Menteri Fiji, Pejabat setingkat Sekjen dari Sri Lanka, Duta Besar Afghanistan. Untuk hal ini, CAPSA mengharapkan agar Menteri Pertanian RI berkenan hadir untuk membuka Sidang GC ke-11 dan Pertemuan HLPD. Pimpinan rapat menyarankan agar CAPSA segera menyurati Mentan RI terkait hal ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAPSA juga mengingatkan mengenai pelibatan media dalam Sidang GC ke-11. Balitbang akan bertanggung jawab untuk hal ini. •
--	--	--	--	---

				<p>internasional maupun tenaga untuk staf lokal.</p> <p>9. Pada pertemuan tersebut, disampaikan 2 (dua) opsi untuk pembiayaan staf lokal CAPSA, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Opsi 1: Staf lokal dibayar semi pemerintah (SBU-APBN dan kontribusi CAPSA) b. Opsi 2: Staf lokal dibayar sepenuhnya oleh pemerintah (SBU-APBN) <p>10. Pertemuan menyepakati bahwa keberadaan CAPSA di Indonesia tetap dipertahankan dengan beberapa persyaratan, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keterlibatan tenaga ahli Indonesia sebagai staf internasional di CAPSA; b. CAPSA harus bisa mengakomodasi kepentingan nasional dalam hal pengentasan kemiskinan di tingkat daerah/propinsi (Pemri menawarkan program); c. Peningkatan <i>capacity building</i> bagi petani yang dibiayai CAPSA ke negara yang relevan (Pemri menawarkan program); d. <i>Local staf</i> yang dibiayai dari kontribusi PEMRI (bagian dari kontribusi), jika honorinya dibayarkan sesuai standar UN 	
--	--	--	--	---	--

				<p>e. Dalam rangka mendukung Kerjasama Selatan-Selatan, CAPSA diharapkan dapat memanfaatkan tenaga ahli Indonesia dalam program-programnya (penguatan <i>soft diplomacy</i> Indonesia pada KSS)</p> <p>11. Direktur CAPSA menjelaskan bahwa CAPSA merupakan institusi regional <i>extra-budgetary</i> dari ESCAP. Sumber pendanaan CAPSA diperoleh dari tiga sumber, yaitu: (i) <i>institutional support</i> (termasuk <i>pledge</i> kontribusi negara-negara anggota); (ii) <i>regular budget</i> dari UNESCAP; (iii) <i>technical cooperation grants</i> (kerjasama proyek-proyek dengan lembaga internasional lainnya).</p> <p>12. Selama ini, biaya gaji Direktur CAPSA dan Regional Adviser ditanggung oleh UNESCAP. Namun, sesuai arahan dari Executive Secretary UNESCAP yang baru, mulai Juli 2015, <i>Regional Adviser</i> akan kembali berkantor di UNESCAP Bangkok. Kemudian, CAPSA diminta untuk membiayai 100% personalnya, termasuk Direktur CAPSA.</p> <p>13. Terkait dengan rencana kerja</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>CAPSA, dijelaskan bahwa CAPSA melakukan studi analisis terkait tiga hal penting yaitu (i) <i>food security and poverty reduction</i>; (ii) <i>technologies for sustainable agriculture</i>; (iii) <i>market access</i>. Untuk tahun 2015, CAPSA memiliki beberapa harapan, diantaranya: wrap-up SATNET, kerjasama dengan Myanmar melalui skema LIFT <i>Thrust Fund</i>, kerjasama dengan Timor Leste melalui proposal bersama dengan skema pembiayaan dari Bank Dunia.</p> <p>14. Direktur CAPSA, Dr. Katinka Weinberger, menginformasikan bahwa GC CAPSA ke-11 akan dilaksanakan pada tanggal 12-13 Februari 2015 di Kantor CAPSA, Bogor. Selain itu terdapat pula acara <i>High Level Policy Dialogue "The Role of Transfer Technology for Sustainable Development Outcomes"</i> pada tanggal 10-11 Februari 2015 di Hotel Royal, Bogor.</p>	
2.	Kamis-Jumat, 22-23 Januari 2015, Puslitbang Tanaman Pangan, Bogor	koordinasi persiapan pelaksanaan <i>11th Session of the GC CAPSA</i>	Pusat KLN; Puslitbang Tanaman Pangan; CAPSA	<p>Hal-hal yang dibahas pada pertemuan tersebut antara lain:</p> <p>a. Sidang akan diselenggarakan di kantor CAPSA, Bogor pada tanggal 12-13 Februari 2015</p> <p>b. Peserta yang telah konfirmasi kehadiran sebanyak 10 peserta.</p>	a. Pusat KLN telah mengkonfirmasi posisi undangan tersebut kini masih berada di Menteri Pertanian (per tanggal 26 Januari 2015, Ag no. U-84);

				<p>Berdasarkan informasi dari CAPSA, Menteri Pertanian Fiji akan hadir, dan Sekretaris Menteri Pertanian Sri Lanka juga akan hadir;</p> <p>c. Lokasi <i>Field trip</i> ke Balai Besar Pascapanen, Balai Besar Biogen, dan Pusat Litbang Perkebunan. <i>Welcome dinner</i> akan diadakan di Restoran Tumar Jinten, Bogor;</p> <p>d. Surat perijinan ke Mabes Polri, Polres Bogor, Kementerian Hukum dan HAM, dan Setneg serta Surat permintaan panitia ke Pusat KLN belum diproses;</p> <p>e. Terkait kedatangan Menteri Pertanian Fiji, CAPSA telah mengirimkan undangan ke Menteri Pertanian RI melalui <i>e-mail</i> perihal permintaan Menteri Pertanian untuk membuka acara <i>High Level Policy Dialogue</i> dan GC CAPSA ke-11.</p> <p>f. Pada pertemuan tersebut, kami juga menyampaikan bahwa Sekretaris Ditjen Multilateral, Kementerian Luar Negeri, meminta Kementerian Pertanian, selaku <i>focal point</i> keanggotaan Indonesia pada CAPSA, untuk mengidentifikasi kewajiban-kewajiban Indonesia selaku <i>host-country</i> yang terdapat di dalam <i>Agreement RI-UN</i> tahun 1981 dan pemenuhannya, melakukan analisis <i>cost and benefit</i> keberadaan kantor CAPSA di Indonesia dan</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>keanggotaan Indonesia pada CAPSA, serta mengajukan kembali usulan pembayaran kontribusi keanggotaan Indonesia pada CAPSA, di luar kewajiban sebagai <i>host country</i>;</p> <p>g. Menanggapi hal tersebut serta menindaklanjuti rapat tentang kontribusi dan keanggotaan RI di CAPSA beberapa waktu lalu di Pusat KLN, kami meminta agar Pusat Litbang Tanaman Pangan segera menganalisa, meninjau ulang dan berkoordinasi untuk membahas hal tersebut dengan Sekretariat Badan Litbang Pertanian dan PSEKP;</p> <p>h. Pada kesempatan itu, kami juga menyempatkan diri untuk meninjau lokasi Sidang yang bertempat di Kantor CAPSA. Sejauh ini, CAPSA sedang mempersiapkan materi dan selalu berkoordinasi dengan Pusat Litbang Tanaman Pangan.</p>	
3.	Selasa, 27 Januari 2015, Ruang Rapat 721	Rapat Persiapan Sidang SPM 2015 BIMP-EAGA	Pusat KLN Ditjen PPHP Kemlu Kemenko Perekonomian KKP SHS Ditjenbun	<ul style="list-style-type: none"> Tanggapan, masukan, dan saran dari instansi terkait mengenai perkembangan proyek-proyek prioritas Cluster Agribisnis yang tercantum dalam IB 2012-2016. 	<ol style="list-style-type: none"> Surat permintaan Delri untuk Ditjenbun Sirkulasi laporan rapat kepada seluruh peserta rapat Pusat KLN akan melaksanakan konsinyering untuk menyusun kertas posisi delegasi RI

4.	Rabu, 28 Januari 2015, Puslitbangtan Bogor	Rapat Persiapan GC-11 UNCAPSA	Badan Litbang CAPSA Pusat KLN	<ul style="list-style-type: none"> • Sidang dilaksanakan di Kantor CAPSA Bogor pada tanggal 12-13 Februari 2015 • CAPSA meminta kesediaan Menteri Pertanian untuk membuka acara tersebut, dan diwakilkan kepada Kepala Badan Litbang. • Menteri Pertanian Fiji, Duta Besar Mongolia, dan Sekretaris Menteri Sri Lanka akan hadir dalam pertemuan ini • Susunan kepanitiaan • Pengaturan logistik sidang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat KLN berkonsultasi dengan Kemlu mengenai tata diplomatik pembukaan acara yang dihadiri oleh pejabat setingkat menteri, dan disarankan agar pertemuan dibuka oleh Sekjen • Pusat KLN akan memproses surat-menyurat terkait perizinan penyelenggaraan (Kemlu, Setneg, Kepolisian, Imigrasi, dll)
5.	Rabu, 28 Januari 2015, Kantor Kemenko Perekonomian	Rapat persiapan Sidang SPM 2015 BIMP-EAGA	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kemlu • Kemdag • Kemdagri • Kemhub • BKPM • KUKM • KKP • PTRI ASEAN • Prop. Kaltim • Prop. Sulut • Prop. Sulsel • Kem Pariwisata • Barantan Kemtan • Pusat KLN Kemtan • Kem LH dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Posisi Delri dari berbagai Cluster • Daerah meminta agar Kementan mengundang daerah untuk menindaklanjuti hasil-hasil pertemuan • Daerah ingin dilibatkan secara aktif dalam forum ini • Susunan Delri • Perlunya pembahasan lebih lanjut dari beberapa proposal proyek, diantaranya “BIMP-EAGA <i>Food and Agribusiness Logistic Corridor</i>” 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko selaku SEKNAS akan memfasilitasi pertemuan ini

			<ul style="list-style-type: none"> Kehutanan BNPP 		
6.	Kamis-Jumat, 29-30 Januari 2015	Koordinasi Persiapan Sidang SPM 2015 BIMP-EAGA	<ul style="list-style-type: none"> Dit. PI Ditjen PPHP PUSKITA KKP Ditjen PPHP KKP Ditjen Perikanan Budidaya, KKP Pusat KLN 	<ul style="list-style-type: none"> Kertas Posisi Delri Draft 1 Permohonan Surat permintaan delri KKP 	<ul style="list-style-type: none"> Surat Sekjen Kemtan kepada Sekjen KKP untuk permintaan delri Surat Kapus KLN kepada Kapuskita KKP untuk berpartisipasi aktif di forum BIMP-EAGA
IV. TATA USAHA DAN ATANI					
1.	Selasa, 6 Januari 2015 di Pusat KLN – Kementerian Pertanian.	Pengajuan GUP Nihil T.A 2014	<ol style="list-style-type: none"> Bendahara Pengeluaran Pusat KLN Pejabat Pembuat Komitmen Pusat KLN KPPN Jakarta V Penandatanganan SPM Petugas SPM 	Berkas pengajuan GUP Nihil T.A 2014 berupa SPM dan ADK untuk diajukan ke KPPN Jakarta V.	Berkas Pengajuan GUP Nihil T.A 2014 untuk rekonsiliasi dan menunggu terbitnya SP2D.
2.	Rabu, 7 Januari 2015 di Pusat KLN – Kementerian Pertanian.	Pengajuan Gaji induk bulan Pebruari 2015 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) pegawai.	<ol style="list-style-type: none"> Bendahara Pengeluaran Pusat KLN Pejabat Pembuat Komitmen Pusat KLN KPPN Jakarta V Penandatanganan SPM 	Berkas pengajuan Gaji induk bulan Januari 2015 berupa SPM dan ADK untuk diajukan ke KPPN Jakarta V.	Berkas Pengajuan Gaji induk bulan Januari 2015 untuk rekonsiliasi dan menunggu terbitnya SP2D.

			5. Petugas SPM		
3.	Rabu, 7 Januari 2015 di Ruang Rapat 721 Lt.7 Ged.A Kanpus Kementerian Pertanian	Rapat Koordinasi Kearsipan lingkup Kementerian Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Kearsipan dan Administrasi 2. Kepala Subbagian Kearsipan, Biro Keuangan dan Perlengkapan 3. Seluruh eselon I atau yang mewakili lingkup Kementerian Pertanian 	<p>Hal – hal yang dibahas antara lain:</p> <p>A. Evaluasi Pengelolaan Arsip Tahun 2014 dan Rencana Kerja Tahun 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan dan penyusutan arsip: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Tahun 2014</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Penataan Arsip Sekretariat Jenderal pada <i>Record Center</i> di Gedung Arsip. b. Penataan Arsip 270 meter linear pada Unit Kearsipan II Setjen. c. Penataan arsip In Aktif dan Statis yang disimpan di Gedung Arsip. d. Penyusutan Arsip : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyerahan Arsip dari unit pengolah ke unit Kearsipan ❖ Pemusnahan Arsip In Aktif dari Ditjen. PPHP • <u>Tahun 2015</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Penataan lantai 6 Gedung Arsip menunggu penyerahan penataan arsip PVT dan fasilitas ruang dari Biro Umum untuk dapat segera digunakan oleh Biro KP. b. Penataan arsip inaktif bidang kepegawaian. 	

				<p>c. Penataan arsip statis Kementan.</p> <p>d. Penyusutan arsip, yaitu penyerahan Arsip Statis Kementan kepada ANRI (direncanakan bertepatan dengan Hari Krida Pertanian)</p> <p>e. Surat Kepala ANRI No.: KN.00.00/21/2014, tanggal 9 Januari 2014 tentang Penyelamatan Arsip Statis.</p> <p>2. Penyusunan Pedoman Kearsipan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Tahun 2014</u> <p>a. Penyusunan Pedoman Kearsipan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Klasifikasi arsip Kementerian Pertanian sesuai dengan Permentan Nomor: 121/Permentan/OT.140/10/2014. ❖ Konsep Jadwal Retensi Arsip (JRA) • <u>Tahun 2015</u> <p>a. Penyusunan Pedoman Kearsipan, yaitu Penyempurnaan Jadwal Retensi Arsip lingkup Kementan menyesuaikan dengan klasifikasi</p> 	
--	--	--	--	--	--

				<p>arsip Kementan.</p> <p>3. Lomba Tertib Arsip</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Tahun 2014</u> <ul style="list-style-type: none"> a. Lomba Tertib Arsip diselenggarakan pada bulan September-Nopember 2014. b. Ruang lingkup Lomba Tertib Arsip: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Lingkup Sekretariat Jenderal ❖ Antar UPT ❖ Antar Eselon I c. Peserta lomba tingkat UPT Berdasarkan usulan eselon I. <p>4. Pelaksanaan E-Arsip</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Tahun 2014</u> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan hasil penggunaan SIKD lingkup Setjen b. Penerapan SIM Arsip Inaktif pada record center. c. Penyempurnaan aplikasi SIKD • <u>Tahun 2015</u> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan SIKD hasil penyempurnaan yang dilakukan Biro Umum, Biro KP dan Pusdatin b. Pelatihan SIM Arsip Inaktif pada record center 	
--	--	--	--	--	--

				<p>5. Bimbingan Teknis Kearsipan</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Tahun 2014</u> <ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan teknis pemberkasan di Malang (eselon I dan UPT lingkup Jawa Timur) b. Bimbingan teknis penyusutan arsip di Lembang (eselon I dan UPT lingkup Jawa Barat) • <u>Tahun 2015</u> <ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan teknis kearsipan: pemberkasan arsip, penyusutan peserta unit kerja eselon I dan UPT <p>B. Pemaparan Kabag Umum Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai pemenang Lomba Tertib Arsip Tingkat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Juara 1 lomba tertib arsip tingkat Kementerian Pertanian RI di tahun 2014 2. Salah satu arsiparis Ditjen Hortikultura terpilih sebagai arsip teladan Kementerian Pertanian, dan ikut berkompetisi pada pemilihan arsip teladan tingkat Nasional <p>Anggaran pengelolaan arsip yang diusulkan oleh Ditjen Hortikultura melalui Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga di T.A 2014</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>adalah Rp. 1.876.600.000, dan di setujui Rp. 978.500.000, + Renovasi Gedung arsip Rp. 600.000.000= Rp. 1.578.500.000, dan anggaran yang diusulkan oleh Ditjen Hortikultura di TA. 2015 Rp. 1.223.000.000, dan di setujui Rp. 1.083.642.000,</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Seluruh Arsip Inaktif tahun 2000 s.d tahun 2011 sudah dientri dalam komputer 4. Seluruh Arsip Inaktif tahun 2000 s.d tahun 2011 sudah tertata dengan baik. 5. Arsip Inaktif Direktorat Jenderal Hortikultura dapat diakses melalui aplikasi arsip inaktif kementerian pertanian, sekarang dalam proses instal pada server Ditjen Hortikultura. 	
4.	Selasa – Rabu, 20 – 21 Januari 2015 di STPP Cibalagung Bogor, Jawa Barat	Pertemuan Pengisian dan Validasi Aplikasi e-Monev Triwulan IV Tahun 2014 Lingkup Kementerian Pertanian di Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) Kampus Cibalagung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Biro Perencanaan 2. wakil-wakil dari eselon II lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian pertanian. 	<p>Hal-hal penting yang menjadi diskusi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Status capaian/status pelaporan dalam e-Monev: <ol style="list-style-type: none"> a. Hijau (baik) b. Kuning (hati-hati) c. Merah (buruk) d. Tanda seru (belum melapor) 2. Kendala pengisian Aplikasi e-Monev 2014: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Target di Triwulan I masih banyak yang kurang tepat 	<p>Direncanakan akan diselenggarakan Workshop Aplikasi Monev 2015 antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop Aplikasi 2015 akan dilaksanakan setelah Data 2015 pada Aplikasi sudah siap (Kemungkinan Akhir Februari 2015)

				<p>sehingga mempengaruhi status capaian di e-monev.</p> <p>b. Nama indikator kinerja kegiatan masih sering berubah. Kementan mengajukan beberapa kali revisi ke Bappenas</p> <p>3. Solusinya:</p> <p>a. Penyusunan Target Fisik dan Anggaran di 2015 disesuaikan dengan kemampuan dan dapat terukur.</p> <p>b. Indikator Kinerja Kegiatan mohon dipastikan sudah tidak berubah lagi</p>	<p>2. Diselenggarakan di 4 wilayah (tentatif)</p> <p>-Yogya</p> <p>-Makassar</p> <p>-Batam</p> <p>-Surabaya</p> <p>3. Eselon I diharapkan dapat menyempurnakan Panduan Pengisian Realisasi Fisik</p>
5.	<p>Senin, 5 – 30 Januari 2015 di Pusat KLN – Kementerian Pertanian.</p>	<p>1. Tawaran Pelatihan Mengenai Sustainable Rural Development Based on Sufficient and Creative, pada tanggal 2 - 13 Maret 2015 di Thailand.</p> <p>2. Tawaran Pelatihan Mengenai</p>	<p>1. Sekretariat Negara RI</p> <p>2. Kementerian Luar Negeri</p> <p>3. Kedutaan Besar Thailand di Jakarta.</p> <p>1. Sekretariat Negara RI</p> <p>2. Kementerian Luar</p>	<p>Telah ditawarkan ke Sekretaris Ditjen Hortikultura dan Kepala Dinas Pertanian Sumatera Utara.</p> <p>Telah ditawarkan ke Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan</p>	<p>Menunggu calon peserta.</p> <p>Menunggu calon peserta.</p>

		<p>Research on Veterinary Technology, pada tanggal 29 Maret – 31 Oktober 2015 di JICA Tsukuba International Center, Ibaraki, Jepang</p> <p>3. Tawaran Pelatihan Mengenai Course on Gene Based Techniques for Research in Bioteknologi, pada tanggal 25 Februari – 18 Maret 2015 di Iztanagar, India.</p>	<p>Negeri</p> <p>3. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.</p> <p>1. Sekretariat Negara RI</p> <p>2. Kementerian Luar Negeri</p> <p>3. Kedutaan Besar India di Jakarta.</p>	<p>Sekretaris Badan Litbang Pertanian.</p> <p>Telah ditawarkan ke Sekretaris Badan Litbang Pertanian.</p>	<p>Menunggu calon peserta.</p>
6.	<p>Senin, 5 – 30 Januari 2015 di Pusat KLN – Kementerian Pertanian.</p>	<p>1. Pencalonan pegawai untuk pelatihan mengenai Sustainable Rural Development Based on Sufficient and</p>	<p>1. Kepala Biro KTLN Setneg RI</p> <p>2. 2.Kedutaan Besar Thailand di Jakarta</p> <p>3. 3.Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri.</p>	<p>Telah dicalonkan 2 orang pegawainya yaitu : 1. Ir. Bambang Hardiantono, Kepala Seksi Kelembagaan Subdit Benih Florikultura, Ditjen Hortikultura. 2. Diah Wiyani Budiwan, SP, M.Si, Staf Sub Bagian Program pada pertanian Propinsi Sumatera Utara</p>	<p>Berkas pencalonan telah dikirim ke Sekretariat Negara RI untuk diteruskan ke pihak penyelenggara melalui Kedutaan Besar Thailand di Jakarta</p>

		<p>Creative, pada tanggal 2 - 13 Maret 2015 di Thailand.</p> <p>2. Pencilonan pegawai untuk pelatihan mengenai Research on Veterinary Technology, pada tanggal 29 Maret - 31 Oktober 2015 di JICA Tsukuba Inyernational Center, Ibaraki, Jepang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro KTLN Setneg RI 2. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta 3. Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri 	<p>Telah dicalonkan 3 orang pegawainya yaitu : 1. Drh. Aprizal Panus, M.Si, Medik Veteriner pada Balai Veteriner Subang, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Drh. Joko Susilo, Medik Veteriner Muda pada Balai Veteriner Lampung, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. 3. Drh. Risza Hartawan, M.phil, Peneliti pada Balai Besar Penelitian Veteriner, Badan Litbang Pertanian.</p>	<p>Berkas pencilonan telah dikirim ke Sekretariat Negara RI untuk diteruskan ke pihak penyelenggara melalui Kedutaan Besar Jepang di Jakarta</p>
7.	<p>Senin, 5 - 30 Januari 2015 di Pusat KLN - Kementerian Pertanian.</p>	<p>Penugasan pejabat/pegawai Kementerian Pertanian ke luar negeri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Negara RI 2. Kementerian Luar Negeri 3. Kedutaan Besar Negara terkait. 4. Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. 	<p>Telah diproses penugasan pejabat /pegawai Kementan ke luar negeri sebanyak 25 orang yaitu mengikuti Workshop/seminar sebanyak 9 orang, menghadiri pertemuan/sidang sebanyak 12 orang, mengikuti pelatihan/training sebanyak 13 orang, melakukan</p>	<p>Berkas /dokumen perjalanan pejabat /pegawai ybs telah dikirim ke Sekretariat Negara RI untuk memperoleh surat persetujuan Setneg RI dan ke Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh exit - permit serta Kedutaan Besar</p>

No	Hari/Tanggal/ Tempat	Kegiatan	Pihak yang Terlibat	Hasil dan Keputusan	Tindak Lanjut
<p>kunjungan kerja sebanyak 1 orang.</p> <p>terkait untuk memperoleh visa.</p>					
V. ATANI BRUSSEL					
1.	Brussel, tanggal 6-9 Januari 2015	Persiapan kunjungan SCAE ke Indonesia, Keikutsertaan <i>World Coffee Expo</i> di Gothenburg, Swedia	Attani, SCAE (<i>Specialty Coffee Association of Europe</i>)	SCAE akan berkunjung ke Indonesia (Kintamani Bali, Java Preanger Bandung, dan Gayo Aceh) pada awal Agustus KBRI Brussel akan mengikuti <i>World Coffee Expo</i> dan menjadi country sponsor	Kontak Daerah yang akan dikunjungi, mencari <i>sponsorship</i> , MPIG, Petani Persiapan bahan pameran, kontak pengusaha
2.	Brussel, tanggal 13 Januari 2015	Pertemuan dengan pengusaha <i>Global nutrition</i>	Attani, Atdag	Membantu proses perijinan <i>Global nutrition</i> ke Direktorat Nakeswan	Kontak drh Bahruddin Syahroni MSi Sub Bag <i>Veterinary Drug Control</i>
3.	Brussel, tanggal 15 Januari 2015	Diskusi informal dengan Staf DG Sante dan DG Agri	DG Sante: Stephan Andree, Fransisco, Maria Cantagalli (SWG SOS team members), Laurent Lordous (Desk Indonesia-DG Agri)	Sepakat untuk terus berkomunikasi informal untuk meningkatkan perdagangan antara RI dengan UE	<i>Stock taking</i> permasalahan (pending matters) kerjasama perdagangan RI-UE Kontak pihak-pihak yang relevan di Pusat (Jakarta)
4.	Brussel, tanggal 20 Januari 2015	Pertemuan dengan Pengusaha: Kadin Jabar dan AWEX-Wallonia-Belgia	Ibu Dar, Madrim Kusumah Andhini, dan Dewi L. Budiman, Dimitri Duong (AWEX)	Kelanjutan kerjasama AWEX dengan Kadin Jabar, identifikasi potensi dan permasalahan pemasaran melalui penggunaan fasilitas di AWEX	Persiapan acara Indonesia update di Wallonia-penyajian <i>chocolate</i> dan kopi Indonesia
5.	Brussel, tanggal 21 Januari 2015	Pertemuan dengan pengusaha	Atdag, Atperin, Attani, Gita	Diskusi mengenai kemungkinan <i>direct-link</i> petani kopi di Mundung, Bali dengan pengusaha café di Brussel Konsultasi ekspor kopi	Sipa memfasilitasi pengembangan <i>direct link</i> petani kopi di Bali dengan

					pengusaha café di Belgia
6.	Brussel ,tanggal 22 Januari 2015	Pertemuan pengusaha via Skype: Matt Ross, supplier kopi luwak ke Harrod, London	Attani, Atdag, Fungsi Ekonomi KRI Brussel	Diskusi mengenai rencana <i>World Coffee Expo</i> di Gothenburg, Tawaran Harrod London untuk membangun Small stand Kopi Spesialti Indonesia di Harrod Supermarket, rencana kunjungan SCAE	Desain stand Kopi Spesialti Indonesia di Gothenburg, memfollow-up tawaran Harrod, dan pembahasan kunjungan SCAE
7.	Brussel ,tanggal 26-27 Januari 2015	Workshop Residu Pestisida (Laporan Lengkap Terlampir)	Komisi Eropa, anggota EFSA (<i>European Food Safety Agency</i>), otoritas berkompeten dari Negara Anggota UE, industri perlindungan tanaman (<i>crop protection industries</i>), perusahaan-perusahaan dalam rantai produksi makanan di UE (<i>European food chain</i>), serta perwakilan negara ketiga eksportir maupun importer produk makanan UE.	Revisi Regulasi Uni Eropa nomor 396/2005 serta tantangan ke depan implementasi peraturan residu pestisida pada makanan ini di wilayah UE. Hal ini mengingat berbagai perubahan yang telah terjadi selama 10 tahun sejak aturan tersebut dikeluarkan, serta semakin meningkatnya kesadaran konsumen akan residu pestisida dalam makanan. Revisi peraturan di atas dilakukan dengan menggunakan 4 pilar, yaitu: 1. petani dan kesehatan masyarakat (<i>farmer and public health</i>), 2. perlindungan dan pelestarian air (<i>protect and conserve water</i>), 3. perbaikan biodiversitas (<i>enhance biodiversity</i>), dan 4. peningkatan keamanan pangan (<i>food safety</i>), kualitas (<i>quality</i>), dan daya beli (<i>affordability</i>). Konsumen EU semakin perhatian terhadap masalah residu ini, mengingat bahwa berdasarkan sampel, EFSA menemukan bahwa pada tahun 2012, 7% produk makanan yang diimpor dari negara ketiga memiliki kandungan residu	Ekspor produk pertanian Indonesia ke UE yang utama selama ini adalah: kelapa sawit, karet, kopra, kopi, kakao, dan rempah-rempah. Dengan berbagai kegiatan diplomasi ekonomi, promosi di UE dan kerjasama Indikasi Geografis dengan UE, diharapkan ekspor produk pertanian Indonesia ke UE akan semakin meningkat. Oleh karena itu, perkembangan aturan mengenai residu pestisida ini perlu dicermati dan Indonesia perlu menyesuaikan aturan residu pestisida di dalam negeri. Ekspor produk pertanian Indonesia ke UE bisa terhambat apabila produk pertanian Indonesia melampaui MRL. Pemri perlu mempertimbangkan upaya

				<p>pestisida lebih dari MRL (<i>maximum residu level</i>) yang ditentukan UE, sedangkan produk dari negara anggota UE yang melampaui MRL sebesar 1,2%. Residu pestisida tersebut berpengaruh terhadap bekerjanya kelenjar tiroid (<i>thyroid</i>) dan otak. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi residu pestisida ini perlu dilakukan tidak hanya di negara anggota UE, namun juga negara partner dagang UE.</p>	<p>penurunan residu pestisida melalui evaluasi kesesuaian pestisida yang sudah beredar di Indonesia dengan pestisida yang diperbolehkan beredar di UE, menambah persyaratan untuk ijin peredaran pestisida yang akan beredar di Indonesia supaya nantinya produk pertanian Indonesia tidak terhambat masuk ke UE, dan mengadopsi teknologi penurunan residu pestisida yang sudah terbukti berhasil.</p>
8.	Brussel 30 Jan	RI-UE Eksploratori talk kerjasama GI	<p>Direktur KSI Amerop, Kemlu Direktur Kerja Sama dan Promosi, Ditjen HKI, Kemenkumham RI, Direktur Merek, Ditjen HKI, Kemenkumham RI, Tim Ahli Indikasi Geografis, Ditjen. HKI, Kemkumham RI; dan perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Pertanian, Sekretaris Kabinet</p>		